



STABILITAS MONETER DAN SEKTOR KEUANGAN

Brigitta Ratih Esthi Aryanti
Intan Natasha Putri
Octal Pramudito

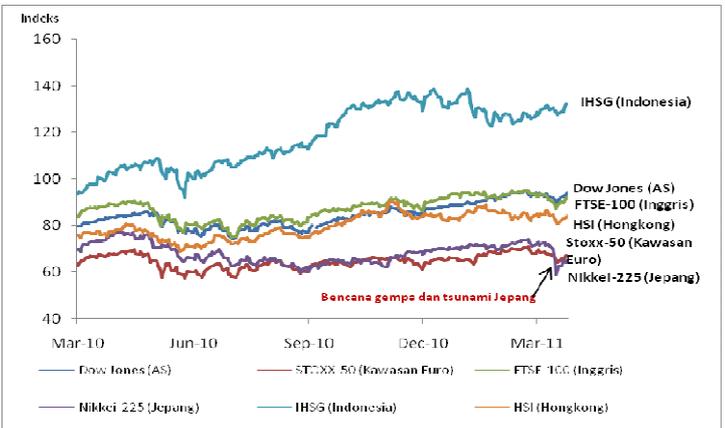
Dampak Tsunami Jepang

- Bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Jepang pada tanggal 11 Maret 2011 berdampak terhadap stabilitas perekonomian dunia. Di pasar keuangan, dalam jangka pendek bencana tersebut menyebabkan melemahnya pasar saham global karena kekhawatiran investor akan dampak bencana tersebut terhadap perekonomian Jepang, yang merupakan perekonomian terbesar ketiga di dunia. Sentimen negatif di pasar saham global juga dipengaruhi oleh kekhawatiran akan terjadinya radiasi nuklir akibat kerusakan reaktor nuklir pascabencana. Dalam jangka menengah, mengalirnya arus modal untuk pembiayaan rekonstruksi dan asuransi ke Jepang diperkirakan akan kembali membuat pasar keuangan global melemah untuk sementara, termasuk di Indonesia.
- Pasar komoditas dunia juga diperkirakan akan terkena dampak dari bencana gempa dan tsunami Jepang. Menurunnya pasokan nuklir di Jepang, yang menyediakan sekitar 30 persen dari pasokan energi domestik, akan menyebabkan bergesernya permintaan ke sumber energi lain, seperti gas alam, batu bara, dan minyak. Meningkatnya permintaan energi alternatif tersebut akan mendorong kenaikan harga komoditas energi, seperti batu bara, gas, dan minyak. Meskipun sampai dengan akhir Maret 2011 harga komoditas dunia belum menunjukkan kenaikan yang signifikan, kecuali minyak mentah, namun diperkirakan akan terjadi kenaikan harga komoditas dunia dalam jangka menengah, khususnya bijih besi, nikel, kayu lapis, dan tembaga seiring dengan rekonstruksi yang dilakukan di Jepang. Hal ini dapat meningkatkan peluang ekspor Indonesia ke Jepang.

Harga Minyak Dunia

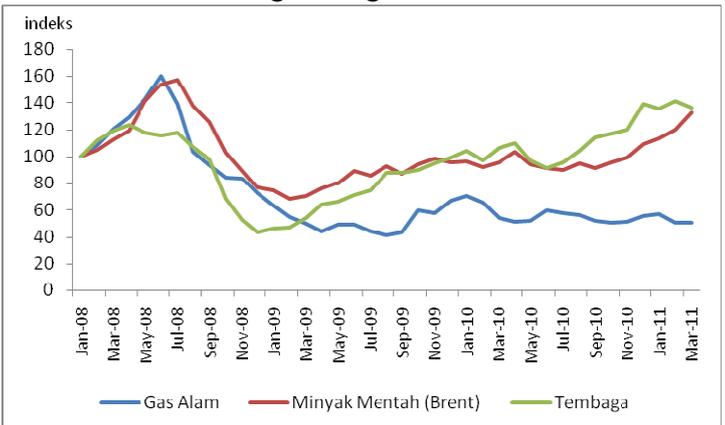
- Pada awalnya setelah adanya gempa dan tsunami yang melanda Jepang, diperkirakan harga minyak dunia mengalami penurunan. Hal tersebut diperkirakan akibat menurunnya demand Jepang untuk minyak dunia akibat guncangan bencana yang cukup dahsyat yang berimbas pada perekonomian Jepang. Tetapi prediksi tersebut tidak terbukti. Harga minyak dunia terus mengalami kenaikan sejak krisis politik di Libya bergulir. Harga minyak dunia secara rata-rata pada bulan Maret mencapai 114,83 USD/barel. Bahkan diperkirakan harga minyak akan terus merambat jika krisis menyebar di negara Timur Tengah lainnya seperti di Yaman.
- Prediksi lainnya menyebutkan bahwa kenaikan harga minyak dunia akan semakin parah ketika rekonstruksi perekonomian Jepang dimulai setelah bencana gempa dan tsunami yang melanda. Rekonstruksi dan rehabilitasi bencana di Jepang membutuhkan banyak energi, sementara pasokan dari energi nuklir mengalami hambatan, sehingga akan menaikkan demand dari minyak dunia. Kenaikan demand tersebut pada akhirnya akan menaikkan harga dari minyak dunia.

Grafik 1. Perkembangan Pasar Modal Dunia



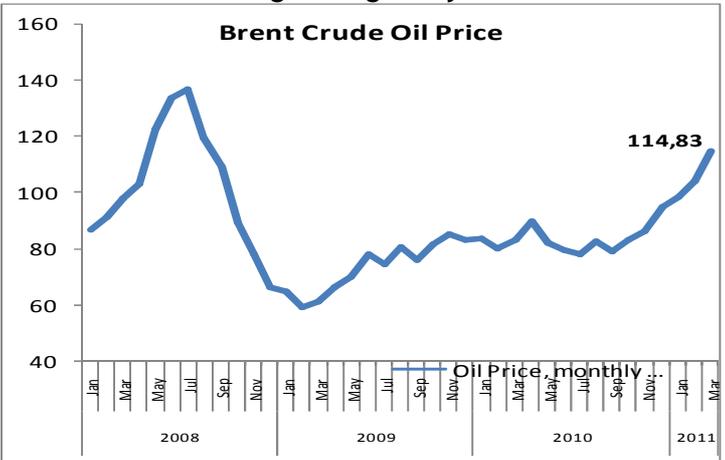
Sumber: Bloomberg

Grafik 2. Perkembangan Harga Komoditas Dunia



Sumber: Tradingeconomics

Grafik 3. Perkembangan Harga Minyak Dunia



Sumber: Tradingeconomics

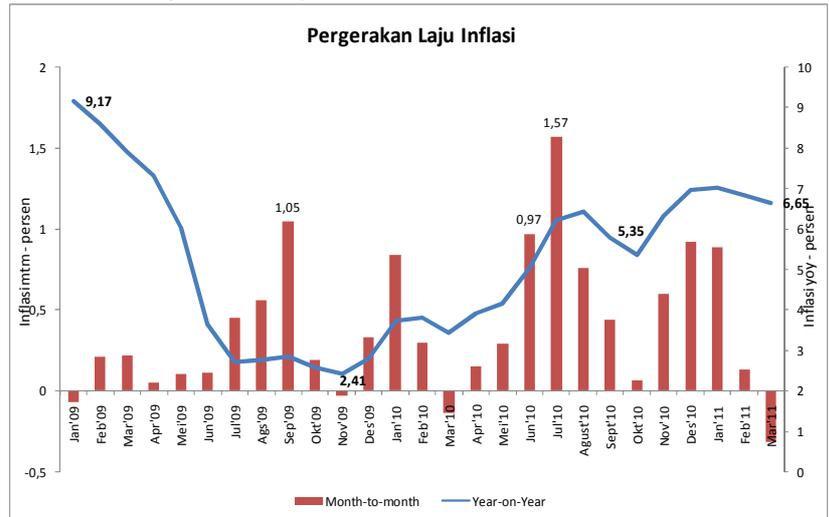


Laporan Bulanan Perekonomian Indonesia

Perkembangan Inflasi

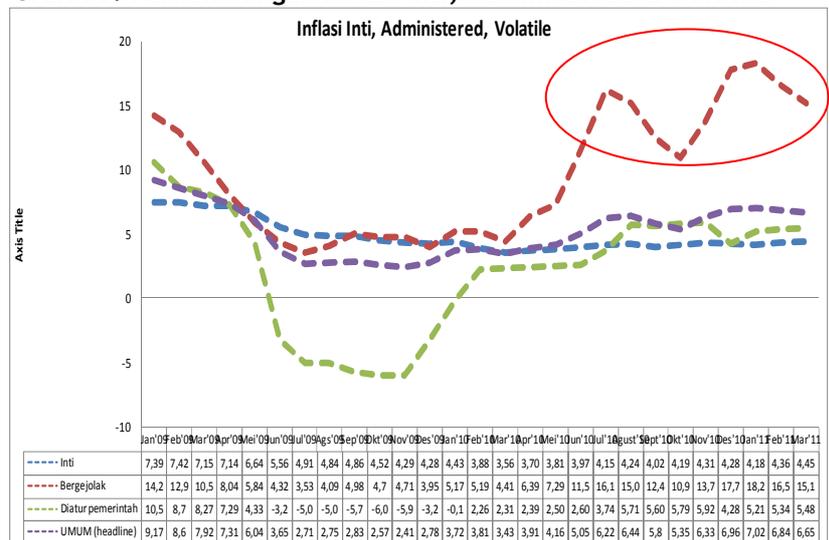
- Pada bulan Maret 2011 terjadi deflasi sebesar 0,32 persen (*month to month*) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 126,05 seiring dengan penurunan harga-harga bahan pangan, terutama beras, yang mulai memasuki panen raya. Laju inflasi tahun kalender (Januari- Maret) 2011 sebesar 0,70 persen dan laju inflasi *year on year* (Maret 2011 terhadap Maret 2010) sebesar 6,65 persen. (Grafik. 4)
- Komponen inti pada bulan Maret 2011 mengalami inflasi sebesar 0,25 persen, laju inflasi komponen inti tahun kalender (Januari- Maret) 2011 sebesar 1,06 persen dan laju inflasi komponen inti *year on year* (Maret 2011 terhadap Maret 2010) sebesar 4,45 persen. Untuk *volatile food* mulai mengalami penurunan. Sejak Mei 2010 sampai dengan maret 2011, inflasi *volatile food* sempat melonjak, hal tersebut disebabkan oleh cuaca ekstrim yang berpengaruh terhadap supply dan distribusi bahan makanan. Inflasi komponen volatile food tercatat sebesar 15,17 persen (yoy) pada bulan Maret 2011. Sedangkan laju inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) tercatat sebesar 5,48 persen (yoy). (Grafik. 5)
- Dari 66 kota IHK, 52 kota mengalami deflasi dan 14 kota mengalami inflasi pada bulan Maret 2011. Beberapa kota seperti Sibolga, Palu dan Bandar Lampung memiliki laju inflasi (yoy) yang cukup tinggi. Secara *month to month*, harga di kota-kota tersebut sudah mengalami deflasi, hal ini terlihat di Lampung dan Sibolga. Untuk Kota Palu masih mengalami inflasi yang cukup tinggi yaitu 0,67 persen (mtm). Inflasi di Palu terjadi utamanya karena adanya kenaikan indeks pada Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; dan kelompok Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar.
- Secara tahunan (yoy) sebanyak 32 kota mengalami inflasi diatas rata-rata nasional. Kota yang mengalami inflasi tahunan tertinggi adalah kota Sibolga dengan tingkat inflasi sebesar 11,37 persen (yoy). Kota tertinggi kedua adalah kota Bandar Lampung yaitu sebesar 10,99 persen (yoy). Kota yang mengalami inflasi terendah adalah kota Palopo dengan tingkat inflasi sebesar 3,96 persen (yoy). Kota-kota dengan inflasi diatas nasional mayoritas berada di pulau Sumatra dan Kalimantan.

Grafik 4. Pergerakan Laju Inflasi



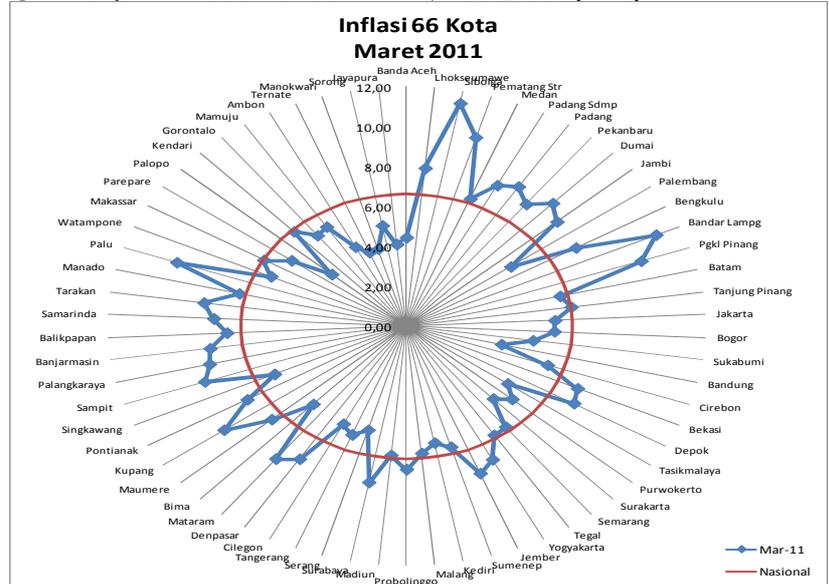
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 5. Perkembangan Inflasi Inti, Administered & Volatile



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 6. Inflasi 66 Kota Periode Maret 2011 (YoY)



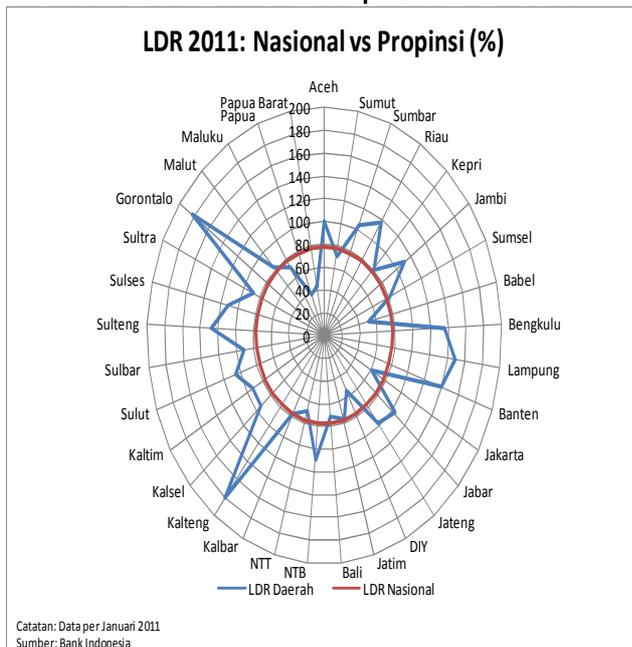
Sumber: Badan Pusat Statistik



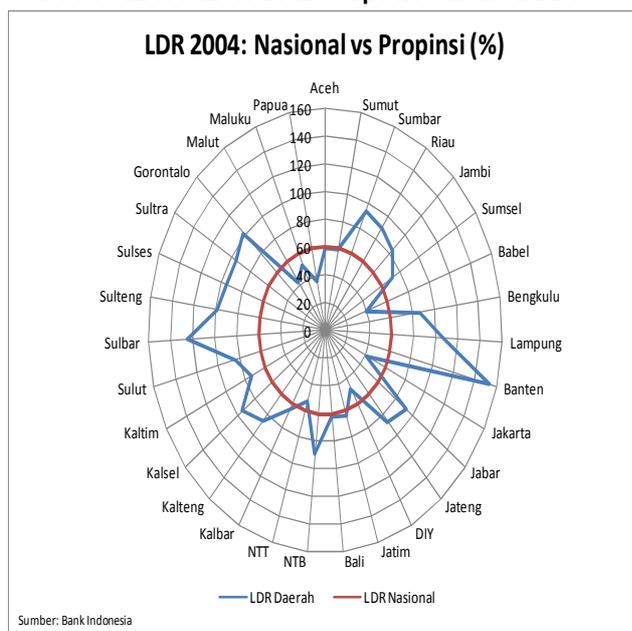
Disparitas LDR Daerah

- Selama 7 tahun terakhir, fungsi intermediasi perbankan di daerah secara umum cenderung membaik. Hal ini terlihat dari *loan to deposit ratio* (LDR) pada tahun 2011 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2004 di hampir seluruh propinsi (kecuali Banten, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat). Meskipun demikian, saat ini masih terdapat beberapa daerah yang memiliki nilai LDR yang cukup jauh di bawah LDR nasional, yang sebagian besar dialami oleh propinsi-propinsi di Jawa dan Indonesia Timur. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurang berkembangnya kegiatan ekonomi akibat belum memadainya dukungan infrastruktur dan belum berkembangnya kewirausahaan di daerah tersebut. Di lain pihak, sebagian besar propinsi di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi memiliki nilai LDR jauh diatas nilai LDR nasional.
- Konsentrasi kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) masih terjadi di wilayah Jawa, namun perbankan melakukan penetrasi kredit yang cukup signifikan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Akan tetapi, jika penetrasi kredit tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan dana, maka akan membuat biaya kredit mahal. Meskipun tren kredit di luar Jawa meningkat signifikan, seperti kredit di Kalimantan yang tumbuh sebesar 26,6%, Maluku 30,7% dan Papua 26,5%, namun aktivitas perbankan nasional masih terpusat di wilayah Jawa-Bali, yang menguasai hampir 73,3% dari total kredit nasional dan 77,4% dari total DPK nasional pada periode Januari 2011.
- Peran perbankan di wilayah Indonesia Timur dapat dikatakan belum signifikan, yang tercermin dari rendahnya LDR serta rendahnya pangsa kredit dan DPK secara nasional. Sebagai contoh pada periode Januari 2011, wilayah Papua memiliki nilai LDR yang hanya mencapai 38,4% dengan pangsa kredit dan DPK masing-masing sebesar 0,44% dan 0,89% secara nasional. Salah satu penyebab dari kondisi ini adalah rendahnya keterampilan kewirausahaan dari sumber daya setempat. Perlu dicermati adanya potensi konflik sosial yang dapat dipicu oleh kecemburuan sosial penduduk asil terhadap para pendatang yang umumnya berhasil dalam berusaha.

Grafik 7. LDR Nasional & Propinsi Tahun 2011



Grafik 8. LDR Nasional & Propinsi Tahun 2004



Kebijakan Baru Perbankan: Kebijakan GWM LDR

Terkait dengan LDR perbankan, Bank Indonesia telah menerapkan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) LDR sejak 1 Maret 2011 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 12/19/PBI/2010. Peraturan ini mendorong perbankan agar memenuhi target LDR sebesar 78-100%. Perbankan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikenakan disinsentif berupa GWM sebesar 0,1% dari kekurangan LDR di bawah 78% dan 0,2% dari kelebihan LDR di atas 100%. Akan tetapi meskipun LDR melebihi 100%, bank tidak akan terkena sanksi jika memiliki rasio kecukupan modal minimal 14%. Bersamaan dengan penerapan ketentuan ini, BI juga memberlakukan kenaikan GWM valas dari 1% menjadi 5%. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit sekaligus menstimulasi penguatan modal.